



**LAPORAN**

**HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI KORUPSI  
SEMESTER II PADA  
PENGADILAN NEGERI  
KOTA TIMIKA**

**TAHUN 2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI  
DIPENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

**DISAHKAN**

**DI TIMIKA, 8 DESEMBER 2020**



**KETUA**

**IDA BAGUS BAMA DEWA PATIPUTRA, SH.,MH**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
<b>BAB II</b> .....	5
<b>METODOLOGI</b> .....	5
2.1. Metode Penelitian.....	5
2.2. Populasi Dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	6
2.5. Teknik Analisis Data.....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	7
<b>BAB III</b> .....	9
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	9
3.1. Profilresponden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator.....	13
3.3. Indeks Persepsi KorupsiSatuan Kerja pada pengadilan.....	20
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayananSatuan Kerja pada pengadilan.....	22
<b>BAB IV</b> .....	23
<b>PENUTUP</b> .....	23
4.1. Kesimpulan.....	23
4.2. Rekomendasi.....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi

bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan public akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3 Landasan Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

#### **1.4 Rencana Kerja**

##### **a. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Persiapan Pelaksanaan

Dilaksanakan sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan

- a) Kuisisioner

- b) Bagian dari Kuisisioner/Pengantar

- c) Kelengkapan peralatan

- Penetapan Responden, lokasi dan waktu pengumpulan data

- a) Jumlah Responden

- b) Lokasi dan waktu pengumpulan data

- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

##### **b. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam kuisisioner.

- Pengisian Kuisisioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuisisioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

c. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kota Timika.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan focus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.



#### 2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPK

#### 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk scoring/ angka absolute agar diketahui peningkatan/ penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan disetiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 -100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

**Tabel 1**

**Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang lingkup survey Indeks Persepsi Korupsi**

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparasi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**

**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

## BAB III

### INDEKS PERSEPSI KORUPSI

#### 3.1. Profil Responden

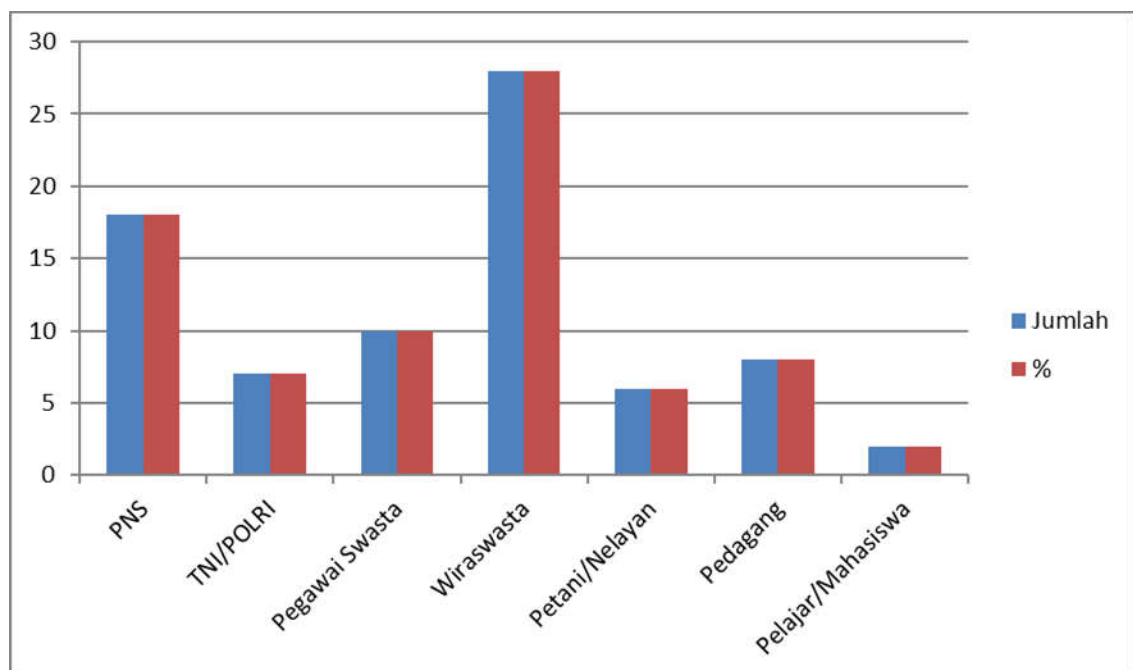
##### a. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Kota Timika mayoritas memiliki latar belakang pendidikan adalah **SLTA** sebesar **60%**

**Tabel 4**  
**Tingkat Pendidikan Responden**

	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1.	SD	2	2
2.	SLTP	8	8
3.	SLTA	60	60
4.	D3	2	2
5.	S1	24	24
6.	S2	4	4
7-	Tidak dicantumkan	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik menurut tingkat pendidikan responden**



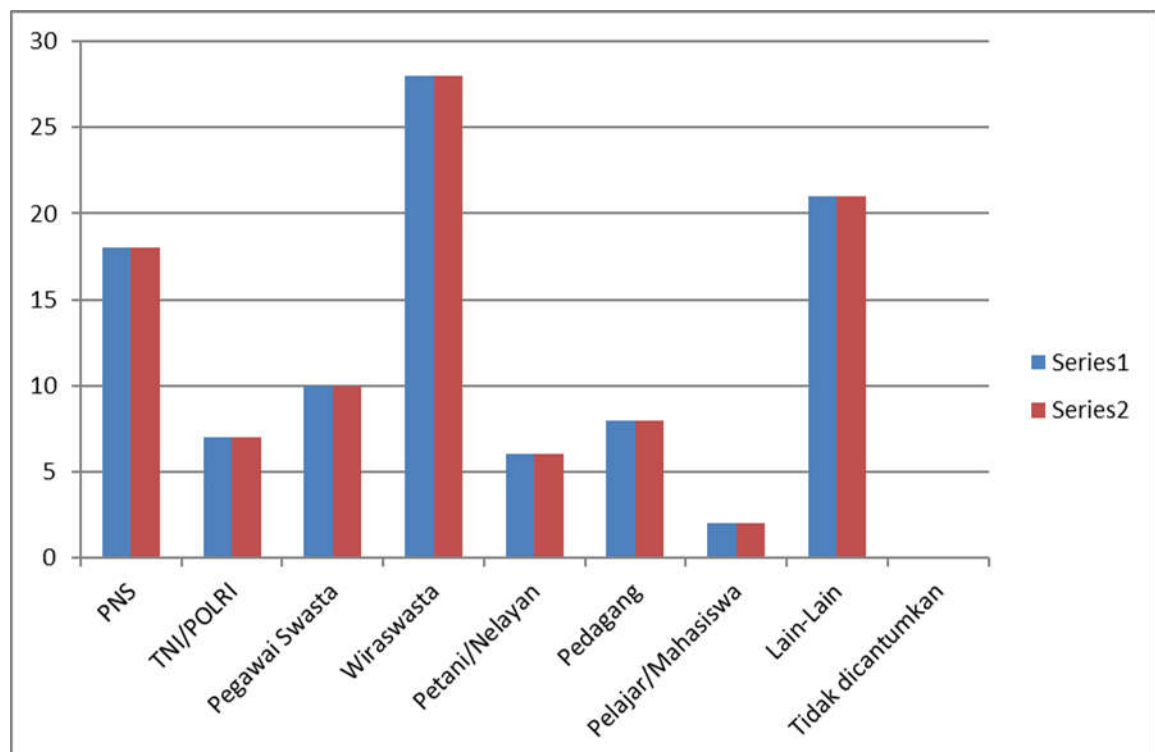
b. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **28%** responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika memiliki jenis pekerjaan **wiraswasta**

**Tabel 5**  
**Tingkat Pendidikan Responden**

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1.	PNS	18	18
2.	TNI/POLRI	7	7
3.	Pegawai Swasta	10	10
4.	Wiraswasta	28	28
5.	Petani/Nelayan	6	6
6.	Pedagang	8	8
7.	Pelajar/ Mahasiswa	2	2
8.	Lainnya	21	21
9.	Tidak dicantumkan	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik menurut jenis pekerjaan responden**



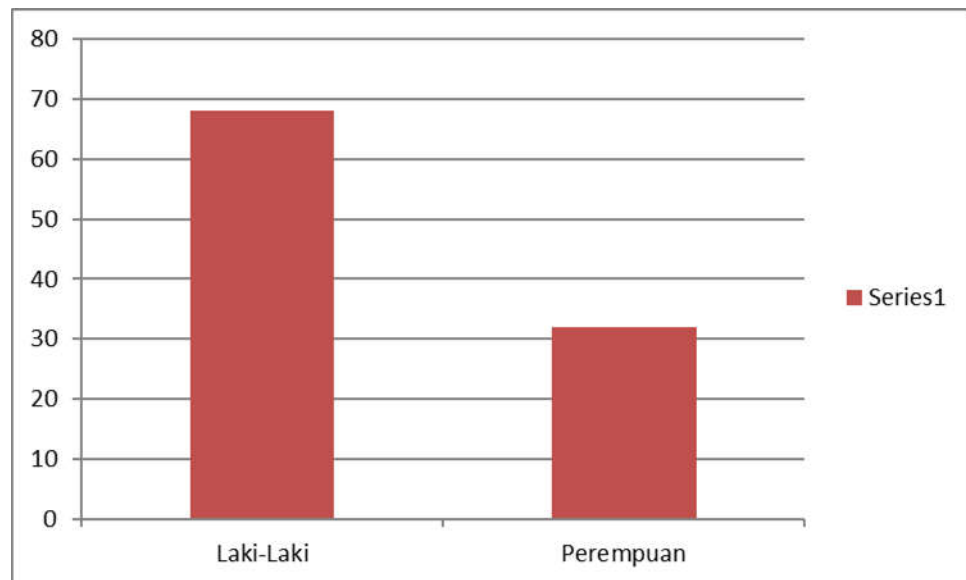
c. Jenis Kelamin

Dari data yang terkumpul selama survey, diperoleh data bahwa berdasar Jenis Kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berjenis kelamin **laki-laki** dengan **68%**

**Tabel 6**  
**Domisili responden berdasarkan jenis kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki – laki	68	68
2.	Perempuan	32	32
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik Menurut Jenis Kelamin**



d. Kelompok usia responden

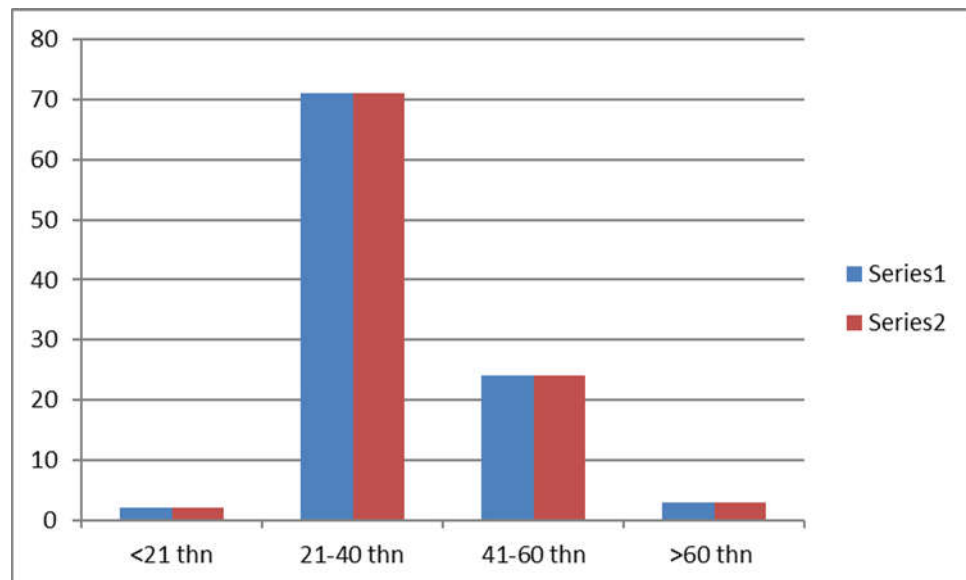
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21- 40. Bagi kelompok diatas 41 tahun jumlah responden semakin sedikit, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

**Tabel 7**  
**Usia Responden**

No.	Usia	Jumlah	%
1.	< 21	2	2
2.	21 – 40	71	71

3.	41 – 60	24	24
4.	>60	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>110</b>	<b>100</b>

**Grafik menurut usia responden**



e. Layanan yang digunakan

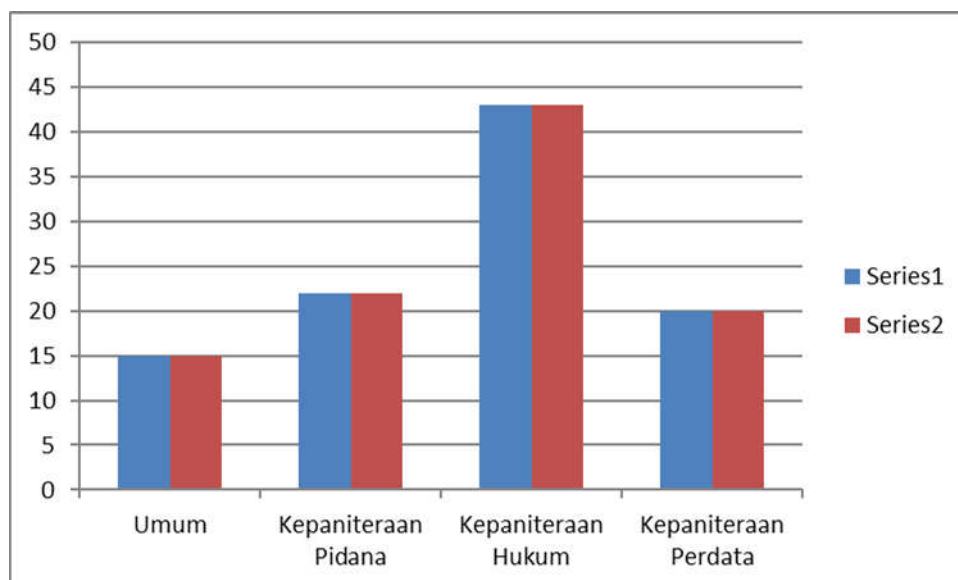
Layanan **kepaniteraan hukum** menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar **43%**

**Tabel 8**

**Jenis layanan yang dipergunakan responden**

No.	Jenis Layanan	Jumlah	%
1.	Umum	15	20
2.	Kepaniteraan Pidana	22	17
3.	Kepaniteraan Hukum	43	43
4.	Kepaniteraan Perdata	20	20
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik jenis layanan yang dipergunakan responden**



### 3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

#### a. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator manipulasi peraturan ini menunjukkan hasil pada index selalu sesuai prosedur.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika bersih dari manipulasi peraturan.

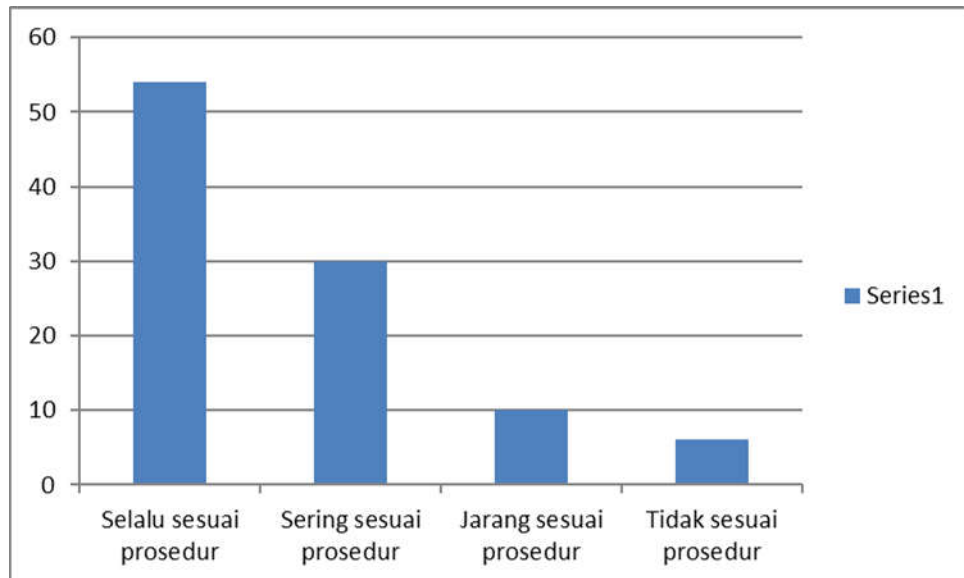
**Tabel 9**

**Indeks pada indikator manipulasi frekuensi**

No.	Manipulasi Peraturan	Jumlah	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu sesuai prosedur	4	54	54
2.	Sering sesuai prosedur	3	30	30
3.	Jarang sesuai prosedur	2	10	10
4.	Tidak sesuai prosedur	1	6	6
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	<b>100</b>



**Grafik indeks pada indikator manipulasi peraturan**



**b. Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan menunjukkan hasil pada indeks 3,97.

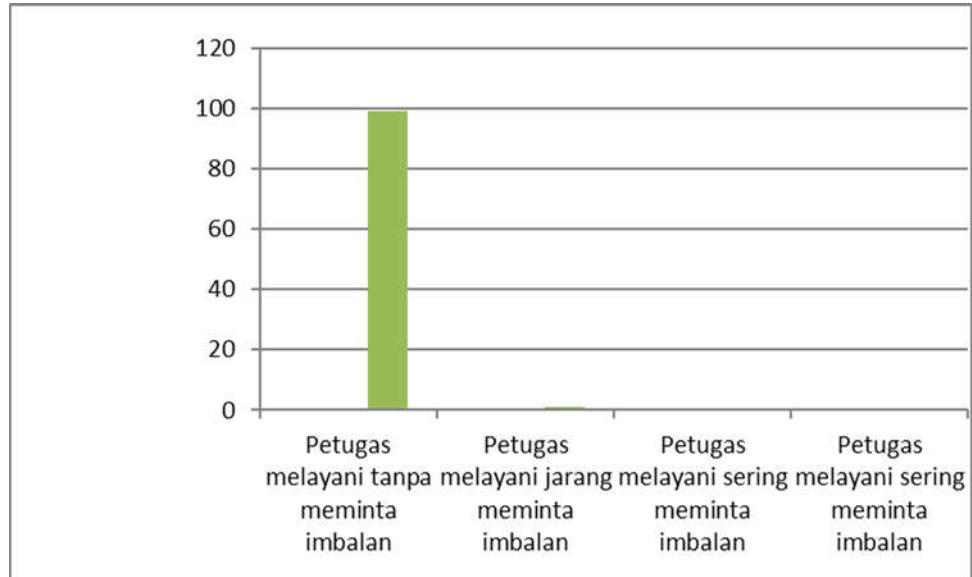
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika cukup bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

**Tabel 10**

**Indeks pada penyalahgunaan jabatan**

No.	Penyalahgunaan Jabatan	Jumlah	Frekuensi	
			F	%
1.	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	99	99
2.	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	1	1
3.	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0
4.	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik indeks pada indikator penyalahgunaan jabatan**



**c. Indikator Menjual Pengaruh**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh menunjukkan hasil pada indeks 4,00.

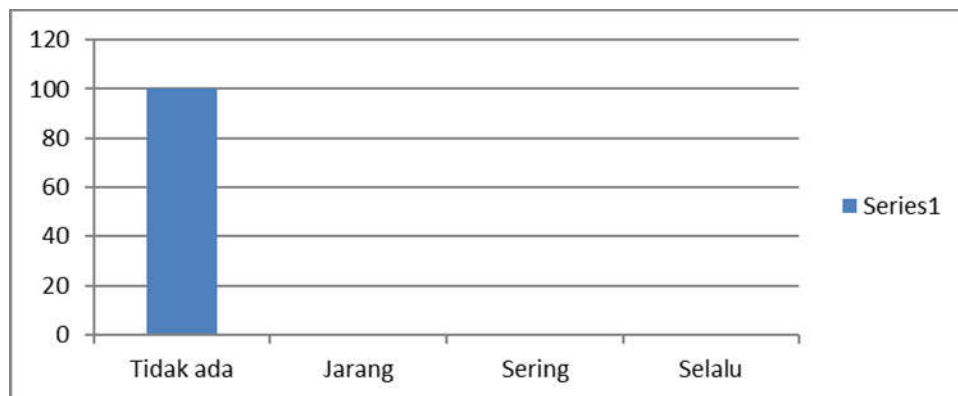
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika bersih dari menjual pengaruh

**Tabel 11**

**Indeks pada indikator menjual pengaruh**

No.	Indikator menjual pengaruh	Jumlah	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak ada	4	100	82,72
2.	Jarang	3	0	11,81
3.	Sering	2	4	3,63
4.	Selalu	1	2	1,81
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik indeks pada indikator menjual pengaruh**



d. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi biaya menunjukkan hasil pada indeks 1,46.

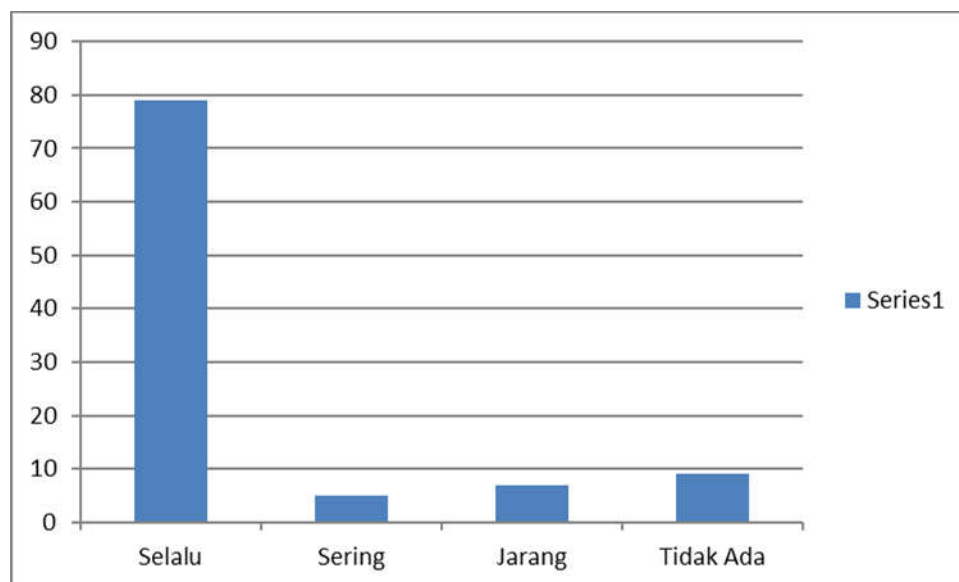
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika cukup bersih dari transaksi biaya.

**Tabel 12**

**Indeks pada indikator transaksi biaya**

No.	Indikator transaksi biaya	Jumlah	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	79	79
2.	Sering	3	5	5
3.	Jarang	2	7	7
4.	Tidak ada	1	9	9
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik indeks pada indikator transaksi biaya**



e. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan menunjukkan hasil pada indeks 3,95.

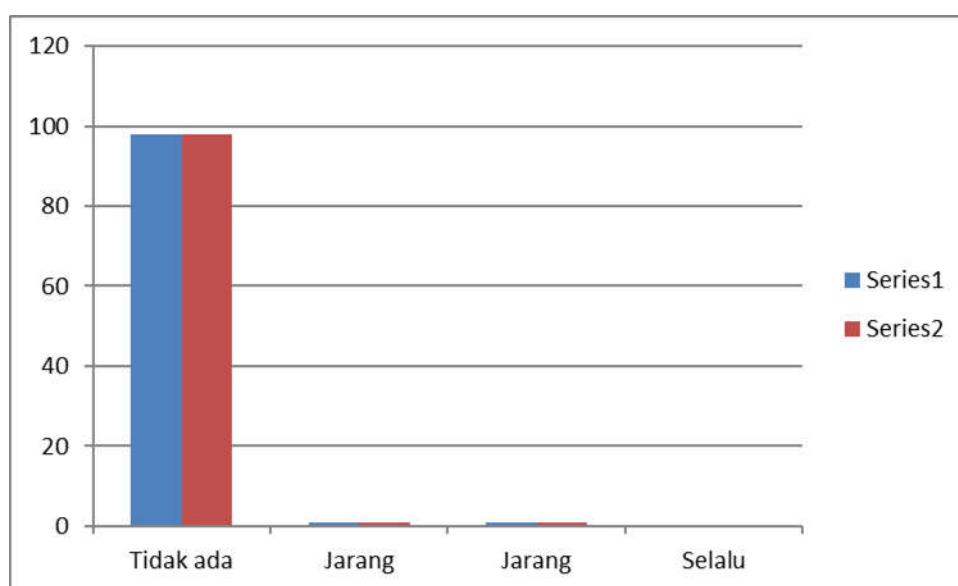
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika bersih dari biaya tambahan.

**Tabel 13**

**Indeks pada indikator biaya tambahan**

No.	Indikator biaya tambahan	Jumlah	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak ada	4	98	98
2.	Jarang	3	1	1
3.	Sering	2	1	1
4.	Selalu	1	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik indeks pada indikator biaya tambahan**



**f. Indikator Hadiah**

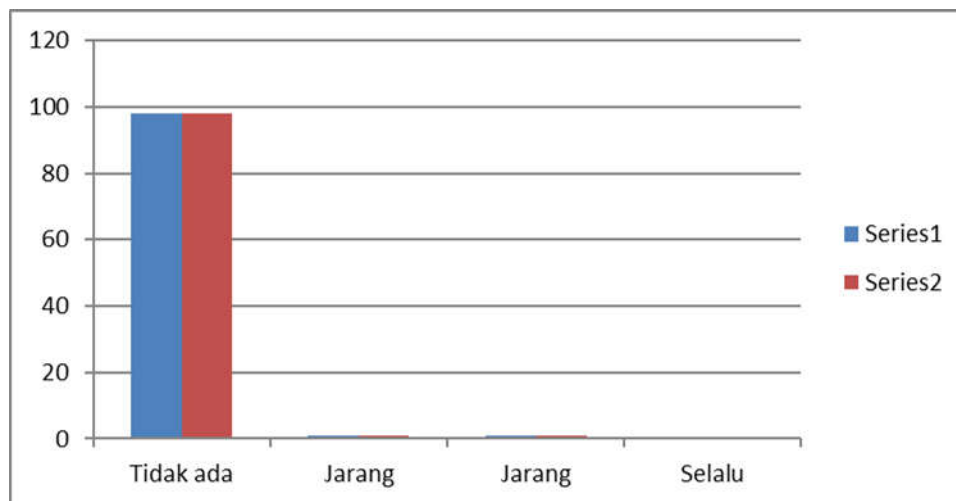
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,82.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika bersih dari pemberian hadiah.

**Tabel 14**  
**Indeks pada indikator hadiah**

No.	Indikator hadiah	Jumlah	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak ada	4	88	88
2.	Jarang	3	8	8
3.	Jarang	2	2	2
4.	Selalu	1	2	2
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik indeks pada indikator hadiah**



**g. Indikator Transparansi Biaya**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 2.01

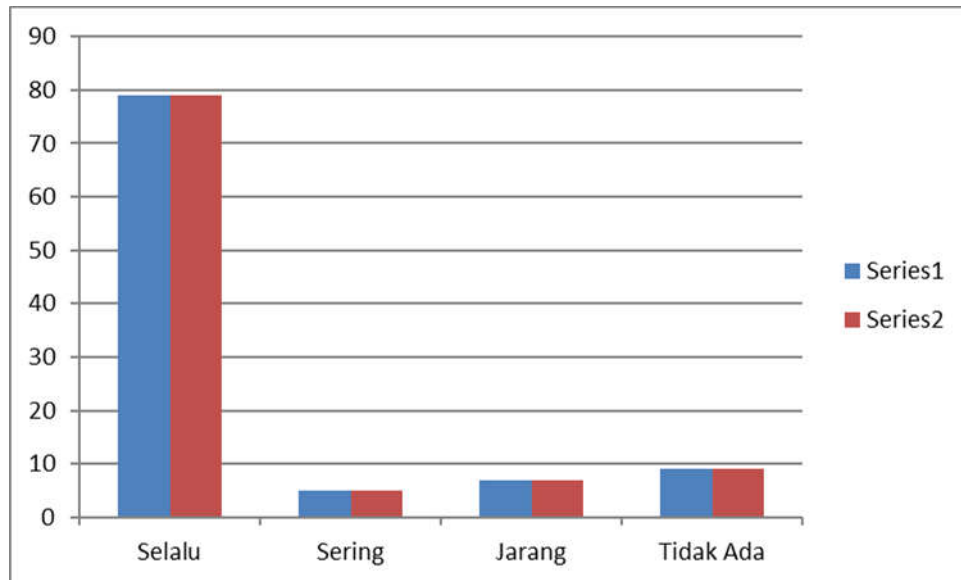
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika cukup bersih dari transparansi biaya.

**Tabel 15**  
**Indeks pada indikator transparansi biaya**

No.	Indikator transparansi biaya	Jumlah	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	79	79
2.	Sering	3	5	5
3.	Jarang	2	7	7
4.	Tidak ada	1	9	9

<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
---------------	------------	------------

**Grafik indeks pada transparansi biaya**



h. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan menunjukkan hasil pada indeks 4,00.

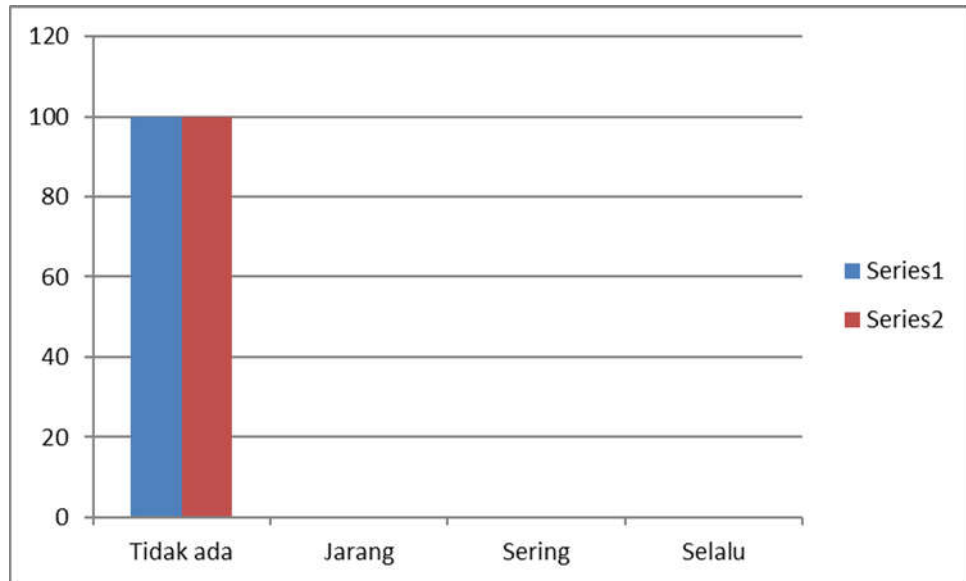
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika bersih dari percaloan.

**Tabel 16**

**Indeks pada indikator percaloan**

No.	Indikator percaloan	Jumlah	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak ada	4	100	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik indeks pada indikator percaloan**



**i. Indikator Perbuatan Curang**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang menunjukkan hasil pada indeks 4,00.

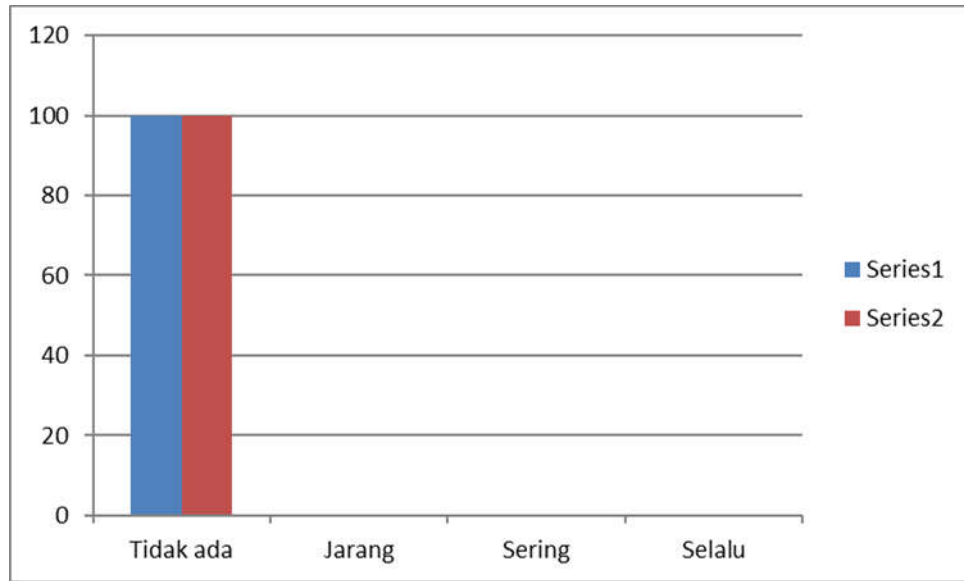
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika bersih dari perbuatan curang.

**Tabel 17**

**Indeks pada indikator perbuatan curang**

No.	Indikator perbuatan curang	Jumlah	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak ada	4	100	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik indeks pada indikator perbuatan curang**



**j. Indikator Transaksi Rahasia**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia menunjukkan hasil pada indeks 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika bersih dari transaksi rahasia.

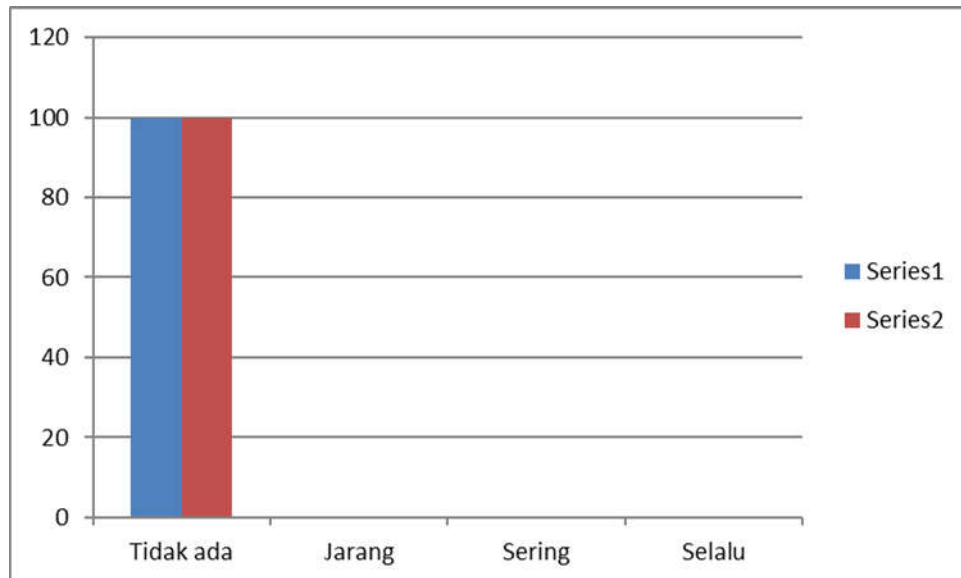
**Tabel 18**

**Indeks pada indikator transaksi rahasia**

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak ada	4	100	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	<b>100</b>



**Grafik indeks pada indikator transaksi rahasia**



**3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan**

Dari indeks 10 indikator tersebut diatas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kota Timika 85,23 atau 3,41 yaitu bersih dari Korupsi

**Tabel 19**  
**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja**  
**Pengadilan Negeri Kota Timika**

Responden	Unsur-unsur Pertanyaan										Ket
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
N. rata-rata	2,88	3,97	4,00	1,46	3,95	3,82	1,36	4,00	4,00	3,89	
<b>NRR Tertimbang</b>	<b>0,29</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,15</b>	<b>0,40</b>	<b>0,38</b>	<b>0,14</b>	<b>0,40</b>	<b>0,39</b>	<b>0,40</b>	<b>3,34</b>
<b>Indeks Persepsi Korupsi</b>											<b>83,60</b>

Indeks 3,41 Tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Bersih dari Korupsi Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **85,23** atau interval 81,26 – 100,00

**Tabel 20**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja**  
**Pengadilan Negeri Kota Timika**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100	4	Bersih dari korupsi

- 3.4. Persepsi Responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjangring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika. Adapun masukan dari responden adalah :

**Tabel 21**  
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan satuan kerja pada**  
**Pengadilan Negeri Kota Timika**

<b>No.</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika</b>
1	Pelayanan PTSP bagus, dan telah mengalami banyak perubahan
2	Pertahankan dan tingkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Kota Timika
3	Agar syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan bias lebih diperjelas dan dipermudah

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survey Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kota Timika diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Kota Timika memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,41 atau 85,23 masuk pada kategori bersih dari korupsi

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 2,88
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,97
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 1,46
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,95
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,82
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 2,01
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2020 semester II tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 85,23 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, Namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan bahwa indikator penyalah gunaan Jabatan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.